

Peran dan Tantangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Era Digital di Indonesia

Adiastita Dwi Septiani¹, Resti Eka Wahyuni², Miranda Nurhafitsyah³, Putri Kurniawati⁴, Eka Sapriani⁵
^{1,2,3,4,5}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika, Jakarta, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Oktober 10, 2024
Revised Oktober 17, 2024
Accepted Oktober 19, 2024

Kata Kunci:

UMKM,
Perekonomian Indonesia,
Digitalisasi

Keywords:

MSMEs,
Indonesian Economy,
Digitalization

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang peran dan tantangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, serta inisiatif yang dilakukan pemerintah dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk mendukung pertumbuhan sektor ini. Berbagai program, antara lain digitalisasi, pelatihan, dan peningkatan akses pembiayaan, telah direncanakan dalam upaya meningkatkan kinerja dan daya saing UMKM. Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan jumlah UMKM yang mengakses pasar digital, dengan harapan mencapai 30 juta unit pada tahun 2024. Meskipun terdapat tantangan dalam standarisasi dan pemerataan pendampingan, komitmen pemerintah dan Kadin untuk mendukung UMKM tetap kuat, dengan fokus pada peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan akses informasi bagi pelaku usaha. Kebijakan dan program tersebut diharapkan dapat memperkuat peran UMKM sebagai pilar penting perekonomian Indonesia, baik dalam kontribusinya terhadap PDB maupun dalam menyediakan lapangan kerja.

ABSTRACT

This research discusses the role and challenges of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia, as well as initiatives undertaken by the government and the Chamber of Commerce and Industry (Kadin) to support the growth of this sector. Various programs, including digitalization, training and increasing access to financing, have been planned in an effort to improve the performance and competitiveness of MSMEs. The government aims to increase the number of MSMEs accessing the digital market, with hopes of reaching 30 million units by 2024. Despite challenges in standardization and equitable distribution of assistance, the government and Kadin's commitment to supporting MSMEs remains strong, with a focus on increasing skills, knowledge and access. information for business actors. It is hoped that these policies and programs can strengthen the role of MSMEs as an important pillar of the Indonesian economy, both in terms of their contribution to GDP and in providing employment opportunities.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Adiastita Dwi Septiani
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika,
Jakarta, Indonesia
Email: addiastitaasepti14@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah bagian penting dalam struktur perekonomian Indonesia [1]. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan sebagai pilar utama dalam pertumbuhan ekonomi inklusif dengan memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menciptakan lapangan kerja. Berdasarkan data terakhir dari [2] yang terbaru, UMKM menyumbang sekitar 61% dari total PDB Indonesia dan menyerap hampir 97% dari total tenaga kerja. Hal ini menunjukkan pentingnya sektor ini bagi kesejahteraan masyarakat dan stabilitas perekonomian nasional.

UMKM di Indonesia mempunyai peran penting dalam perekonomian, namun pertumbuhannya terhambat oleh berbagai tantangan, termasuk terbatasnya akses terhadap pendanaan, rendahnya literasi digital, dan sulitnya memperoleh standar dan sertifikasi global. Mengandalkan cara tradisional membuat mereka kurang kompetitif di era digital. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah dan swasta untuk memberikan akses pelatihan, pendanaan, dan infrastruktur guna mendukung transformasi digital agar UMKM dapat berkembang di ekosistem ekonomi digital yang semakin kompleks [3].

Dalam rangka mengatasi tantangan tersebut, Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) telah memperkenalkan berbagai inisiatif dan program untuk mendukung perkembangan UMKM, sebagaimana yang dijelaskan dalam [2]. Salah satu fokus utama adalah digitalisasi [4], dengan tujuan meningkatkan akses pelaku UMKM ke pasar digital. Program Transformasi Digital UMKM bertujuan untuk meningkatkan akses pasar digital bagi UMKM hingga mencapai 30 juta unit pada tahun 2024.

Selain digitalisasi, pemerintah juga menyediakan program pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pelaku UMKM, serta mendukung proses digitalisasi. Program ini bertujuan untuk membantu UMKM memahami teknologi baru, meningkatkan literasi digital, dan mengoptimalkan penggunaan alat digital. Selain itu, Program ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan diri UMKM dalam menghadapi perubahan pasar, seperti yang tercatat dalam penelitian jurnal [5]. Kombinasi digitalisasi dan pelatihan pemerintah membantu UMKM beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar dan teknologi. Pusat Layanan Usaha Terpadu dari Kementerian Koperasi dan UKM mendukung perizinan, pembiayaan, dan akses pasar bagi pelaku usaha. Seperti yang disebutkan dalam jurnal [6], program-program ini meningkatkan daya saing UMKM di tingkat domestik dan internasional. Pemerintah menawarkan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pelaku UMKM dalam menghadapi era digital. Program ini membantu meningkatkan kepercayaan diri pelaku UMKM dalam menghadapi perubahan pasar. Kombinasi digitalisasi dan pelatihan pemerintah membentuk ekosistem untuk mendukung pertumbuhan UMKM, memfasilitasi transformasi dan inovasi di era digital. Pusat Layanan Usaha Terpadu yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM memberikan dukungan dalam hal perizinan, pembiayaan, dan akses pasar bagi para pelaku usaha. Program-program ini membantu UMKM beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi, serta meningkatkan daya saing di level domestik maupun internasional.

Penelitian ini akan membahas peran serta kontribusi UMKM dalam perekonomian Indonesia, tantangan yang dihadapi, serta kebijakan dan program yang telah dilakukan oleh pemerintah dan Kadin untuk mendukung sektor ini. Dengan pemahaman yang lebih mendalam

tentang dinamika UMKM, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan UMKM sebagai salah satu pilar utama dalam perekonomian Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini menerapkan beberapa pendekatan dalam menganalisis kinerja dan kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia. Metode yang digunakan meliputi pengumpulan data kuantitatif dari sumber resmi seperti Kementerian Koperasi dan UKM serta Kadin. Data yang dikumpulkan mencakup statistik jumlah UMKM, kontribusi terhadap PDB, dan penyerapan tenaga kerja. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan kondisi dan kinerja UMKM, seperti pertumbuhan jumlah UMKM, kontribusi terhadap PDB, dan tren penyerapan tenaga kerja. Penelitian ini juga melibatkan studi kasus tentang upaya pemerintah dan Kadin dalam mendukung UMKM, seperti program digitalisasi, pelatihan, dan pembinaan.

Metode lain yang bisa digunakan untuk menggambarkan kondisi dan kinerja UMKM di Indonesia adalah analisis deskriptif. Analisis ini mencakup; Pertumbuhan jumlah UMKM dari tahun ke tahun, Kontribusi UMKM terhadap PDB, dan Tren penyerapan tenaga kerja. Analisis ini penting untuk memahami dinamika sektor UMKM dan tantangan yang dihadapi. Penelitian ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber, seperti studi pustaka dan data sekunder, yang kemudian dianalisis untuk diinterpretasikan. Kolaborasi antara pemerintah, Kadin, dan pelaku UMKM penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan. Penelitian dapat mengidentifikasi kebutuhan dan harapan para pelaku UMKM, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran.

Penelitian ini melibatkan studi kasus tentang upaya pemerintah dan Kadin dalam mendukung UMKM melalui program digitalisasi, pelatihan, dan pembinaan untuk meningkatkan daya saing. Dengan menganalisis kebijakan tersebut, penelitian bisa mengevaluasi efektivitas dan dampaknya terhadap pertumbuhan UMKM. Dengan pendekatan komprehensif ini, dokumen ini bertujuan memberikan gambaran yang jelas dan mendalam tentang peran UMKM dalam perekonomian Indonesia, serta langkah-langkah yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhannya secara berkelanjutan.

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian UMKM

Pengertian UMKM [1] dalam kajian ini mengacu pada Undang-Undang UKM Nomor 20 Tahun 2008, yang merupakan singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM diatur berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik individu atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

- c. Usaha Menengah adalah jenis usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh individu atau entitas bisnis yang bukan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan lain, dan tidak terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dalam hal kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Badan Pusat Statistik (BPS) telah menetapkan definisi yang lebih spesifik mengenai Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berdasarkan jumlah tenaga kerja. Menurut BPS, Usaha Kecil adalah entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja antara 5 hingga 19 orang. Sementara itu, Usaha Menengah adalah entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja antara 20 hingga 99 orang [7].

2.1.2 Kriteria UMKM

Tabel 1. Data Kriteria UMKM

No	Uraian	Kriteria	
		Asset	Omzet
1	Usaha Mikro	Maks.50 Juta	Maks.300 Juta
2	Usaha Kecil	> 50 Juta - 500 Juta	> 300 Juta - 2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	> 500 Juta - 10 Miliar	> 2,5 Miliar - 50 Miliar

Sumber: Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021

- a. Usaha Mikro: Fokus pada usaha dengan asset maksimal 50 juta dan omzet maksimal 300 juta.
- b. Usaha Kecil: Fokus pada usaha dengan asset lebih dari 50 juta hingga 500 juta dan omzet lebih dari 300 juta hingga 2,5 miliar.
- c. Usaha Menengah: Fokus pada usaha dengan asset lebih dari 500 juta hingga 10 miliar dan omzet lebih dari 2,5 miliar hingga 50 miliar.

Usaha Besar merupakan kegiatan ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang lebih besar dari Usaha Menengah. Ini dapat mencakup usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang beroperasi di Indonesia [8]. Asset yang dimiliki oleh usaha mikro, kecil, dan menengah yang diikutsertakan adalah asset yang tidak termasuk tanah dan bangunan. Oleh karena itu, walaupun nilai asset tanah dan bangunan melebihi 50 juta, tetap dapat dianggap sebagai usaha kecil

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 HASIL PENELITIAN

Peran UMKM amat penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia karena jumlahnya mencapai 99% dari total unit usaha. Pada tahun 2023, jumlah pelaku usaha UMKM mencapai sekitar 66 juta. Kontribusi UMKM mencapai 61% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia, senilai Rp9.580 triliun. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyerap sekitar 117 juta pekerja (97%) dari total tenaga kerja.

Tabel 2. Rekap Data UMKM 2018-2023

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah UMKM (Juta)	64.19	65.47	64	65.46	65	66
Pertumbuhan (%)		1,98%	-2,24%	2,28%	-0,70%	1,52%

Kategori UMKM berdasarkan modal usaha saat pendirian:

- Usaha Mikro: Modal usaha maksimal satu miliar rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha).
- Usaha Kecil: Modal usaha lebih dari satu miliar rupiah hingga lima miliar rupiah.
- Usaha Menengah: Modal usaha lebih dari lima miliar rupiah hingga sepuluh miliar rupiah.
- Usaha Besar: Modal usaha lebih dari sepuluh miliar rupiah.

Pemerintah bekerja sama dengan Kadin untuk mendorong para pelaku UMKM di Indonesia agar dapat masuk ke dalam ekosistem digital. Kementerian Koperasi dan UKM berencana meningkatkan jumlah UMKM yang terlibat dalam pasar digital menjadi 24 juta unit pada tahun 2023 dan mencapai 30 juta unit pada tahun 2024.



Gambar 1. Grafik Jumlah UMKM yang Masuk ke Ekosistem Digital di Indonesia 2020-2024

Untuk mencapai target tersebut, Kadin mendukung program pemerintah dalam inisiasi transformasi digital UMKM melalui berbagai program, termasuk platform wikiwirausaha yang sejalan dengan KemenkopUKM yang membuka pusat layanan usaha terpadu.

Pada tahun 2023, Industri Mikro Kecil (IMK) mencatat pertumbuhan positif di setiap triwulan, dengan rata-rata kenaikan sebesar 2.55 persen. Kelompok industri pakaian jadi (KBLI 14) adalah kelompok industri dengan kontribusi nilai tambah terbesar kedua, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 3,02% dari waktu ke waktu. Industri makanan (KBLI 10) merupakan kelompok industri dengan kontribusi nilai tambah terbesar, namun mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar 0.003 persen.

Sementara itu, sektor industri pengolahan tembakau (KBLI 12) dan industri logam dasar (KBLI 24) mengalami penurunan yang cukup besar, masing-masing sebesar 39,82 persen dan 29,13 persen dalam pertumbuhan. Mengetahui jumlah dan laju pertumbuhan UMKM sangat penting karena peran krusialnya dalam perekonomian Indonesia. Data UMKM umumnya

bermanfaat untuk mengetahui hal-hal berikut; Mengetahui jumlah dan tingkat pertumbuhan UMKM di Indonesia, yang mengindikasikan kondisi perekonomian nasional, dan menggambarkan kondisi ekonomi di suatu daerah. Jika jumlah UMKM terus bertambah, itu menandakan kondisi ekonomi sedang meningkat. Sebaliknya, penurunan atau stagnasi UMKM dapat menunjukkan kondisi ekonomi yang melemah. Akademisi memerlukan data UMKM untuk studi riset, baik kuantitatif maupun kualitatif, guna mengamati dan menganalisis tren terkait isu sosial dan ekonomi. Pemerintah menggunakan data UMKM untuk membuat kebijakan publik dan keputusan strategis terkait pengembangan dan pemberdayaan ekonomi di tingkat nasional maupun daerah.

3.2 Kontribusi UMKM terhadap Perekonomian

UMKM menyumbang 61% terhadap PDB Indonesia, atau sekitar Rp9.580 triliun. Selain itu, UMKM menyerap sekitar 117 juta pekerja, mencerminkan peran penting mereka dalam penciptaan lapangan kerja. Pada tahun 2023, meskipun terjadi penurunan produksi di beberapa sektor, UMKM secara keseluruhan menunjukkan pertumbuhan positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,55%.

UMKM mencakup sekitar 99% dari keseluruhan unit usaha di Indonesia, menunjukkan dominasi mereka dalam struktur ekonomi. Kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 61% menunjukkan pentingnya peran mereka dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. UMKM juga mempekerjakan sekitar 117 juta orang, mencakup 97% dari total angkatan kerja di Indonesia. Ini menegaskan bahwa UMKM merupakan penyumbang utama lapangan kerja di negara ini. Pada tahun 2023, bisnis Industri Mikro Kecil (IMK) mencatat pertumbuhan positif tiap triwulan, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,55%. Ini mencerminkan ketahanan dan potensi pertumbuhan UMKM meskipun ada tantangan yang dihadapi.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) beroperasi di berbagai sektor, termasuk industri makanan, pakaian jadi, dan pengolahan tembakau, yang berperan dalam mendiversifikasi ekonomi dan meningkatkan ketahanan sektor industri [9]. Secara keseluruhan, UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, baik dalam kontribusi terhadap PDB, penciptaan lapangan kerja, maupun sebagai bagian dari struktur bisnis di negara ini.

UMKM juga berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Beberapa peran penting UMKM antara lain; Penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan usaha baru, peningkatan pemerataan ekonomi dan pelestarian budaya serta kearifan lokal. Pada tahun 2023, 95% tenaga kerja berasal dari UMKM, yang memainkan peran kunci dalam menurunkan tingkat pengangguran. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang tumbuh akan memberikan pendapatan kepada pemilik usaha dan karyawan, sehingga meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

UMKM yang sedang berkembang akan membutuhkan tenaga kerja tambahan untuk mendukung operasional, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, UMKM juga berperan dalam meningkatkan pemerataan ekonomi, terutama dengan menyebarkan UMKM ke seluruh wilayah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. UMKM yang memproduksi barang atau jasa tradisional berperan dalam pelestarian budaya dan kearifan lokal di Indonesia.

3.3 Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) terhadap peran UMKM

Analisis SWOT menunjukkan bahwa UMKM di Indonesia memiliki kekuatan dan peluang yang signifikan, namun juga memiliki kelemahan dan dihadapi oleh ancaman yang perlu diatasi. Dengan dukungan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, UMKM dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

Tabel 3 Analisis SWOT Terhadap Peran UMKM

Strengths (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)	Opportunities (Peluang)	Threats (Ancaman)
Kontribusi Besar terhadap PDB: UMKM menyumbang 61% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia, menunjukkan peran penting dalam perekonomian nasional	Akses Terbatas ke Pembiayaan: Banyak UMKM yang kesulitan mendapatkan akses ke modal dan pembiayaan yang memadai untuk pengembangan usaha	Transformasi Digital: Pemerintah dan Kadin mendorong digitalisasi UMKM, dengan tujuan membuka akses ke pasar yang lebih luas dan meningkatkan efisiensi operasional.	Persaingan yang Ketat: UMKM menghadapi persaingan dari usaha besar dan perusahaan multinasional yang memiliki sumber daya lebih besar
Penyerap Tenaga Kerja: UMKM menyerap sekitar 117 juta pekerja, yang mencerminkan kemampuan mereka dalam menciptakan lapangan kerja	Keterbatasan Inovasi dan Teknologi: Banyak pelaku UMKM yang belum memanfaatkan teknologi modern, yang menghambat efisiensi dan daya saing	Dukungan Pemerintah: Program-program pemerintah untuk mendukung UMKM, seperti pusat layanan usaha terpadu, memberikan peluang untuk pengembangan	Fluktuasi Ekonomi: Ketidakpastian ekonomi dan fluktuasi pasar dapat mempengaruhi permintaan terhadap produk UMKM
Jumlah yang Signifikan: Terdapat sekitar 66 juta pelaku usaha UMKM menciptakan diversifikasi dalam sektor ekonomi.	Literasi Digital Rendah: Keterbatasan pengetahuan tentang digitalisasi menghalangi UMKM untuk memasuki pasar digital	Permintaan Pasar yang Meningkat: Dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, ada peluang untuk meningkatkan permintaan terhadap produk dan layanan UMKM	Regulasi yang Rumit: Proses perizinan dan regulasi yang kompleks dapat menjadi hambatan bagi UMKM untuk berkembang

Strengths (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)	Opportunities (Peluang)	Threats (Ancaman)
Pertumbuhan Positif: Meskipun menghadapi tantangan, UMKM mengalami pertumbuhan positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,55% pada tahun 2023.	Branding dan Pemasaran yang Lemah: UMKM sering kali kesulitan dalam memasarkan produk mereka secara efektif, yang dapat mengurangi daya saing di pasar	Inovasi Produk: Peluang untuk mengembangkan produk baru dan inovatif yang dapat memenuhi kebutuhan pasar yang terus berubah	Perubahan Teknologi yang Cepat: Perkembangan teknologi yang cepat dapat membuat UMKM kesulitan dalam menyesuaikan dan bersaing.

3.4 Pembahasan Penelitian

Kinerja UMKM mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2023 di setiap triwulan, dengan rata-rata pertumbuhan sebanyak 2,55%. Meskipun ada penurunan di sektor tertentu seperti industri makanan dan pakaian jadi, namun sektor lain seperti pengolahan tembakau mengalami pertumbuhan yang signifikan. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyumbang 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, menunjukkan peran signifikan mereka dalam perekonomian negara. Dengan sekitar 66 juta pelaku usaha, UMKM menyerap 97% tenaga kerja di Indonesia.

Tantangan yang dihadapi UMKM di Indonesia meliputi inovasi dan teknologi, literasi digital, produktivitas, legalitas, pembiayaan, serta pemasaran. Tantangan ini memerlukan perhatian dari semua pihak terkait dalam upaya meningkatkan daya saing UMKM. Pemerintah dan Kadin Indonesia berusaha mendorong UMKM agar dapat beradaptasi dengan ekosistem digital. Target kami adalah meningkatkan jumlah UMKM yang terlibat dalam pasar digital menjadi 24 juta unit pada tahun 2023. Hal ini mencerminkan komitmen kami untuk meningkatkan akses dan daya saing.

Inovasi dan teknologi menjadi hambatan bagi banyak UMKM, karena kesulitan menerapkan teknologi modern yang mengurangi efisiensi dan daya saing mereka. Literasi digital yang kurang juga menghambat akses ke pasar digital dan pemanfaatan peluang di era digital. Selain itu, produktivitas tetap menjadi tantangan krusial bagi UMKM agar dapat bersaing dengan perusahaan besar dan meningkatkan efisiensi operasional. Proses perizinan yang kompleks dan permasalahan hukum sering kali menjadi hambatan bagi UMKM dalam beroperasi secara sah dan berkembang. Pembiayaan merupakan tantangan besar bagi banyak UMKM yang kesulitan mendapatkan modal untuk pengembangan usaha.

Tantangan lain adalah branding dan pemasaran, di mana banyak UMKM menghadapi kesulitan dalam membangun merek dan memasarkan produk secara efektif. Keterbatasan pengembangan sumber daya manusia (SDM), seperti pelatihan dan pengembangan keterampilan, menghambat UMKM dalam meningkatkan kinerja dan daya saing. Selain itu, banyak UMKM menghadapi tantangan dalam memenuhi standarisasi dan sertifikasi yang dibutuhkan untuk bersaing di pasar domestik dan internasional. Tantangan dalam pemerataan pembinaan dan fasilitasi juga ada, yang dapat menyebabkan ketidakmerataan dalam

pengembangan usaha di berbagai daerah. Tantangan-tantangan ini membutuhkan kerjasama dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia.

Kinerja UMKM di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa menunjukkan pertumbuhan yang stabil, mencerminkan perbaikan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas usaha UMK meningkat sejalan dengan kondisi ekonomi yang membaik. Inisiatif digitalisasi oleh pemerintah dan Kadin berperan penting dalam mendorong UMKM beradaptasi dengan ekosistem digital, meningkatkan kinerja dan daya saing di pasar global.

Secara keseluruhan, program dan kebijakan pemerintah, termasuk pusat layanan usaha terpadu, program wikiwirausaha, serta pembinaan dan pelatihan UMKM menunjukkan komitmen kuat untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan UMKM. Kebijakan ini penting untuk memastikan UMKM tetap berperan sebagai pilar ekonomi Indonesia. UMKM berkontribusi pada PDB, lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah dan Kadin mendorong UMKM untuk adopsi Transformasi Digital. Ini adalah upaya untuk meningkatkan jumlah UMKM yang dapat mengakses pasar digital, dengan target mencapai 24 juta unit pada tahun 2023 dan naik menjadi 30 juta unit pada tahun 2024. Kementerian Koperasi dan UKM memiliki Pusat Layanan Usaha Terpadu untuk membantu pelaku UMKM dalam berbagai hal, seperti perizinan, pembiayaan, dan akses pasar.

Selain itu, Kadin juga mendukung program pemerintah melalui Program Wikiwirausaha, yang memberikan informasi dan sumber daya kepada pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha mereka. Pemerintah dan Kadin bekerjasama dalam meningkatkan kinerja UMKM melalui strategi digitalisasi untuk meningkatkan daya saing dan ekspor di pasar global. Pemerintah fokus pada Pembinaan dan Pelatihan UMKM untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam menjalankan usaha serta memenuhi standar dan sertifikasi yang diperlukan. Kebijakan dan program tersebut menunjukkan dukungan pemerintah terhadap pertumbuhan UMKM, yang merupakan pilar ekonomi Indonesia.

Pemerintah bersama Kadin mendorong penggunaan teknologi digital melalui program digitalisasi, meningkatkan literasi digital, dan membantu UMKM masuk ke pasar digital untuk bersaing lebih baik di era digital. Dengan hadirnya Pusat Layanan Usaha Terpadu, pemerintah memberikan akses yang lebih mudah bagi UMKM dalam mendapatkan informasi dan bantuan terkait perizinan, pembiayaan, dan pengembangan usaha. Pemerintah mengadakan program pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan keterampilan sumber daya manusia (SDM), serta menaikkan produktivitas dan daya saing UMKM.

Kualitas sumber daya manusia (SDM) memiliki peran krusial dalam kesuksesan UMKM. Pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi karyawan dan pemilik usaha memiliki peran krusial dalam meningkatkan kemampuan pengelolaan bisnis. Standarisasi dan sertifikasi produk diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, membuka akses ke pasar internasional, dan meningkatkan daya saing UMKM. Penting juga untuk memastikan pemerataan pembinaan, pelatihan, dan fasilitasi di seluruh wilayah Indonesia, agar semua UMKM mendapatkan dukungan dan bimbingan yang setara, yang akan membantu mengurangi kesenjangan dalam pengembangan usaha di berbagai daerah.

Tabel 4. Peran UMKM dalam Perekonomian Indonesia

Aspek	Keterangan
Jumlah Unit Usaha	Mencapai 99% dari seluruh unit usaha di Indonesia.
Jumlah Pelaku Usaha	Terdapat sekitar 66 juta pelaku usaha UMKM pada tahun 2023.
Jumlah Penyerap Tenaga Kerja	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyerap sekitar 117 juta pekerja, mewakili 97% dari total tenaga kerja di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM menjadi sumber utama lapangan kerja di negara ini.
Kontribusi terhadap PDB	Pencapaian 61% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia, sebesar Rp9.580 triliun.
Pertumbuhan Positif	Pada tahun 2023, Industri Mikro Kecil (IMK) mengalami pertumbuhan positif di setiap triwulan, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,55%. Ini menunjukkan kekuatan dan peluang pertumbuhan UMKM meskipun menghadapi tantangan.
Diversifikasi Sektor Ekonomi	Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) beroperasi di berbagai sektor, seperti industri makanan, pakaian jadi, dan pengolahan tembakau. Hal ini berperan dalam diversifikasi ekonomi dan ketahanan sektor industri.
Tantangan yang Dihadapi	Inovasi dan teknologi, Literasi digital, Produktivitas, Legalitas/izin, Pembiayaan, Branding dan pemasaran, Sumber daya manusia, Standardisasi dan sertifikasi, Pemerataan pembinaan dan pelatihan, dan Basis data tunggal.
Upaya dalam Mengatasi Tantangan	Penerapan Digitalisasi, Pusat Layanan Usaha Terpadu, Program Pelatihan dan Pembinaan, Inisiatif untuk Meningkatkan Akses Pembiayaan, Dukungan dalam Branding dan Pemasaran, Standardisasi dan Sertifikasi dan Kolaborasi dengan Stakeholders.
Mempertahankan Peran Penting UMKM dalam Ekonomi Indonesia	Peningkatan Akses ke Pasar Digital, Transformasi Digital, Menyediakan pelatihan yang berfokus pada peningkatan keterampilan manajerial, pemasaran, dan teknologi bagi pelaku UMKM, Mempermudah akses pembiayaan bagi UMKM melalui kerjasama dengan lembaga keuangan dan penyediaan modal, Mendorong UMKM untuk berinovasi dalam produk dan layanan mereka, Membantu UMKM dalam membangun merek yang kuat dan strategi pemasaran yang efektif, Mendorong kolaborasi antara UMKM, Kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan UMKM diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM. Mereka juga perlu dibantu dalam memenuhi standar kualitas dan sertifikasi agar dapat bersaing di pasar domestik maupun internasional.

Aspek	Keterangan
Program dan Kebijakan Pemerintah yang Mendukung UMKM di Indonesia	Untuk meningkatkan daya saing dan orientasi ekspor UMKM serta memasuki ekosistem digital, Pusat Layanan Usaha Terpadu telah dibuka oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Pusat ini dirancang untuk membantu pelaku UMKM dalam berbagai hal, seperti perizinan, pembiayaan, dan akses pasar. Tidak hanya itu, Kadin juga mendukung program pemerintah melalui platform wikiwirausaha, yang bertujuan memberikan informasi dan sumber daya bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha mereka. Pemerintah juga memberikan pembinaan dan pelatihan kepada UMKM untuk meningkatkan keterampilan serta pengetahuan mereka dalam menjalankan usaha, sekaligus memenuhi standar dan sertifikasi yang diperlukan.

Pemerintah dan Kadin bertekad mendukung perkembangan UMKM di Indonesia melalui berbagai inisiatif, seperti digitalisasi, pelatihan, dan peningkatan akses pembiayaan. Dengan bekerja sama dengan lembaga keuangan, mereka menawarkan produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM. Selain itu, dukungan dalam branding dan pemasaran membantu UMKM membangun merek yang kuat dan strategi pemasaran yang efektif. Upaya meningkatkan daya saing UMKM, baik di pasar domestik maupun internasional, dilakukan melalui upaya mencapai standar dan sertifikasi yang diperlukan. Dengan mempromosikan kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, diciptakanlah lingkungan yang mendukung pertumbuhan UMKM. Hal ini memungkinkan UMKM untuk mengatasi berbagai hambatan dan meningkatkan kontribusinya terhadap ekonomi Indonesia.

Pemerintah dan Kadin bertujuan meningkatkan akses pasar dan kinerja global UMKM melalui fokus pada transformasi digital. Langkah-langkah tersebut termasuk pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan keterampilan serta mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Inisiatif-inisiatif tersebut menunjukkan keseriusan dalam mendukung UMKM Indonesia agar mampu bersaing dan beradaptasi dengan tren ekonomi global.

4. KESIMPULAN

Dari analisis yang dilakukan, UMKM memegang peranan penting dalam ekonomi Indonesia dengan kontribusi mencapai 61% terhadap PDB dan menyerap tenaga kerja sekitar 117 juta orang. UMKM bukan hanya sebagai tulang punggung ekonomi, tetapi juga turut menciptakan lapangan kerja dan mendukung struktur ekonomi nasional. Namun, hadapi tantangan seperti akses terbatas terhadap pembiayaan, literasi digital yang rendah, dan kesulitan dalam memenuhi standar dan sertifikasi, mengurangi daya saing di pasar global. Pemerintah dan Kadin telah meluncurkan program dukungan seperti digitalisasi, pelatihan, dan pembinaan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan daya saing UMKM di era digital, serta memperkuat sektor ini dan memaksimalkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

REFERENSI

- [1] Gunawan, K. (2019). Peran studi kelayakan bisnis dalam peningkatan umkm (studi kasus umkm di kabupaten kudus). *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 6(2), 101–115.
- [2] Kadin.id. (2024). *Data dan Statistik UMKM Indonesia*. Kadin.Id. <https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/>
- [3] INDEF. (2024). *Peran Platform Digital Terhadap Pengembangan Umkm Di Indonesia*. 10–40.
- [4] Ismail, I., & Bahgia, S. (2021). Digitalisasi Sebagai Strategi Revitalisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal EMT KITA*, 5(2), 131–139. <https://doi.org/10.35870/emt.v5i2.431>
- [5] Agustin, A., Putra, G. P. E., Pramesti, D. T., & Madiistriyatno, H. (2023). Strategi UMKM Dalam Menghadapi Digitalisasi. *Oikos-Nomos: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis*, 16, 33.
- [6] Nugroho, W., & Iryanti, E. (2023). Pengaruh Pelatihan, Pembinaan dan Keterampilan Wirausaha Terhadap Kinerja Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Sidoarjo. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(1), 88–94. <https://doi.org/10.37531/sejaman.v6i1.2916>
- [7] Yolanda, C. (2024). Peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam pengembangan ekonomi Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(3), 170–186.
- [8] Santosa, T., & Budi, Y. R. (2021). Analisa Perkembangan Umkm Di Indonesia Pada Tahun 2017 - 2019. *Develop: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 57–64. <https://doi.org/10.53990/djep.v1i2.62>
- [9] Evi Sirait, Bagus Hari Sugiharto, Jenal Abidin, Nely Salu Padang, & Johni Eka Putra. (2024). Peran UMKM dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perekonomian di Indonesia. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(7), 3816–3829. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i7.4160>